

RENCANA AKSI

**RENCANA
AKSI 2020**



**PENGADILAN NEGERI
BALE BANDUNG**

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Pengadilan Negeri Bale Bandung

Tahun 2020

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2020 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun 2020 dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Negeri Bale Bandung dalam rangka mewujudkan Visi yaitu :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Bale Bandung Yang Agung”

dengan Misi :

1. Menjaga kemandirian Badan Peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan.
5. Mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

6. Meningkatkan penyederhanaan proses penanganan perkara melalui Teknologi Informasi.

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Bale Bandung Tahun 2020 mencantumkan program, kegiatan, target dan anggaran sebagaimana terlampir :

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan:				
		- Perdata	75%	100%	100%	100%
		- Pidana	75%	80%	80%	10%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu:				
		- Perdata	25%	50%	75%	80%
		- Pidana	25%	50%	75%	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara :				
		- Perdata	0%	20%	30%	40%
		- Pidana	0%	20%	30%	30%
		d. Persentase perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum:				
		- Banding	100%	100%	90%	90%
		- Kasasi	100%	100%	80%	50%
- PK	100%	100%	80%	75%		

		e. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi	0%	5%	7%	10%
		f. Indek responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	0%	86%	0%	86%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase isi Putusan Yang diterima Oleh para pihak Tepat Waktu:	50%	75%	90%	100%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	1%	3%	4%	5%
		c. Persentase Perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu:	25%	50%	70%	100%
		d. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus.	0%	0%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	√	√	√	√	Perkara peradilan umum Yang Diselesaikan di tingkat pertama dan banding yang tepat waktu	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Pidana Yang di selesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Barat	115.221.000
2.	Penetapan hari sidang	√	√	√	√				28.950.000
3.	Pemeriksaan di sidang pengadilan	√	√	√	√				168.082.000
4.	Minutasi/Upaya Hukum	√	√	√	√				28.950.000

5.	Pengiriman Salinan Putusan kepada JPU dan Terdakwa	√	√	√	√				3.600.000
6.	Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan	√	√	√	√				4.080.000
7.	Penanganan Perkara banding di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				5.760.000
8.	Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	√	√	√	√				2.600.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan:	0%	0%	0%	0%
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan:	0%	0%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan Bantuan Hukum Posbakum:	25%	50%	75%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Pos Bantuan Hukum	√	√	√	√	Layanan Pos Bantuan Hukum	Program Peningkatan	Pos Bantuan Hukum	38.400.000

							Manajemen		
2.	Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung Pengadilan	-	-	-	-			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	0
3.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Perkara	√	√	√	√	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		Perkara Peradilan yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di wilayah Jawa Barat	0

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti (dieksekusi)	0%	0%	0%	0%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
		1.	Pelaksanaan Pembebasan Biaya Eksekusi	√	√				

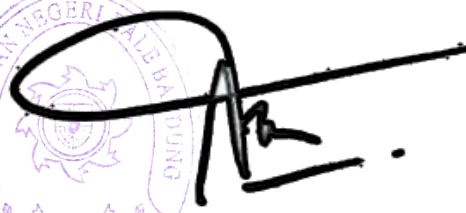
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Jumlah pengawasan biaya perkara b. Jumlah pengawasan keuangan DIPA c. Jumlah pengawasan administrasi umum	0%	100%	0%	100%
6.	Meningkatnya kualitas SDM	a. Jumlah SDM yang mengikuti diklat administrasi Umum b. Jumlah SDM yang mengikuti diklat teknis	0%	100%	0%	100%

NO	AKSI/KEGIATAN	JADWAL				OUTPUT / KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	Dana (Rp.)
		PELAKSANAAN							
		TW I	TW II	TW III	TW IV				
1.	Perjalanan Dinas ke Kanwil dan KPPN	√	√	√	√	Layanan Dukungan Manajemen Satker	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Admnistrasi	6.020.000

2.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	√	√	√	√	Layanan Perkantoran			
	a. Rapat koordinasi								21.000.000
	b. Konsultasi	√	√	√	√				52.640.000

KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS 1 A

BALE BANDUNG,



TENRI MUSLINDA, S.H.,M.H.
NIP. 19681018 199212 2001